

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory (Teori Keagenan)

Agency theory dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976) yang menjelaskan hubungan antara principal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Teori ini menyatakan bahwa terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan, di mana pemegang saham sebagai pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola perusahaan atas nama mereka.

Dalam hubungan keagenan, terdapat dua permasalahan utama yaitu:

1. Konflik kepentingan antara principal dan agen Ketika keduanya memiliki tujuan yang berbeda, dan
2. Asimetris informasi yang terjadi karena agen memiliki informasi lebih banyak tentang kondisi internal perusahaan dibandingkan principal. Asimetris informasi ini dapat dapat memberikan kesempatan kepada manajemen untuk melakukan tindakan opportunistic, termasuk memanipulasi laporan keuangan demi kepentingan pribadi.

Untuk mengatasi masalah keagenan tersebut, diperlukan mekanisme monitoring dan bonding yang efektif. *Good Corporate Governance* merupakan salah mekanisme monitoring yang dapat mengurangi konflik kepentingan dan asimetris informasi antara principal dan agen. Dalam konteks penelitian ini, lima mekanisme *Good Corporate Governance* berperan sebagai alat monitoring yang

dapat mengurangi peluang manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan.

2.1.2 *Fraud theory* (Teori Kecurangan)

2.1.2.1 Fraud Triangle Theory

Fraud Triangle Theory dikemukakan oleh Donald Crassey (1953) yang mengidentifikasi tiga elemen yang mendorong seseorang melakukan kecurangan, yaitu:

1. **Pressure** (Tekanan) Tekanan merupakan dorongan atau motivasi yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Tekanan dapat berupa tekanan finansial, tekanan untuk mencapai target, atau tekanan dari pihak eksternal. Dalam konteks perusahaan manufaktur, tekanan dapat muncul dari ekspektasi pasar untuk mencapai target laba, persaingan industri yang ketat, atau kesulitan finansial yang dihadapi perusahaan.
2. **Opportunity** (Kesempatan) Kesempatan adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Kesempatan muncul Ketika pengendalian internal lemah, pengawasan tidak efektif, atau ketika manajemen memiliki otoritas yang besar tanpa checks and balances yang memadai. Mekanisme corporate governance yang kuat dapat mengurangi kesempatan terjadinya kecurangan dengan meningkatkan pengawasan dan memperkuat system pengendalian internal.
3. **Rationalization** (Rasionalisasi) Rasionalisasi adalah pembenaran yang dibuat oleh pelaku untuk membenarkan tindakan kecurangannya. Pelaku sering kali mencari alasan untuk membenarkan tindakannya, misalnya

dengan menganggap bahwa tindakannya tidak merugikan siapapun atau dilakukan untuk kepentingan perusahaan.

2.1.2.2 Fraud Pentagon Theory

Crowe's Fraud Pentagon Theory (2011) merupakan pengembangan dari Fraud Triangle dengan menambahkan dua elemen, yaitu:

4. **Competence** (Kompetensi) Kemampuan dan keahlian yang dimiliki seseorang untuk melakukan dan menyembunyikan kecurangan. Manipulasi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang akuntansi dan sistem pengendalian internal memiliki kompetensi lebih tinggi untuk melakukan manipulasi laporan keuangan.
5. **Arrogance** (Arogansi) Sikap superioritas dan keserakahan yang membuat seseorang merasa bahwa pengendalian internal tidak berlaku baginya. Arogansi sering terjadi pada manajemen puncak yang merasa memiliki kekuasaan dan tidak dapat disentuh oleh sistem pengawasan.

Dalam konteks penelitian ini, mekanisme *Good Corporate Governance* berperan dalam mengurangi elemen-elemen fraud pentagon, khususnya opportunity (kesempatan) melalui pengawasan yang ketat oleh Dewan Komisaris, Komite Audit, Auditor Eksternal, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial. Keberadaan mekanisme monitoring yang efektif dapat mencegah manajemen untuk memanfaatkan kesempatan melakukan kecurangan, sekaligus memberikan efek deterrence karena risiko terdeteksinya kecurangan menjadi lebih tinggi.

2.1.3 Good Corporate Governance

2.1.3.1 Definisi Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan kaitan antara pengelola perusahaan dan pengurus, pemerintah, pihak kreditur, karyawan, pemegang saham, dan pemegang kepentingan eksternal dan internal lainnya diatur oleh peraturan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, GCG mengacu pada sistem yang mengawasi perusahaan (Nurhaliza et al., 2023). Menurut Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001), Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Penerapan GCG yang efektif ditandai dengan implementasi konsisten dari lima prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh OECD (2015): transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Kelima prinsip ini harus tercermin dalam seluruh mekanisme corporate governance yang diterapkan perusahaan.

2.1.3.2 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Menurut Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD, 2015), terdapat lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* yang baik, yaitu:

1. **Transparency (Transparansi)** Pengungkapan informasi yang akurat, memadai, dan tepat waktu mengenai semua hal materil yang berkaitan dengan perusahaan.
2. **Accountability (Akuntabilitas)** Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. **Responsibility (Responsibilitas)** Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. **Independency (Independensi)** Pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5. **Fairness (Keadilan)** Perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder.

2.1.3.3 Mekanisme *Good Corporate Governance* dalam Penelitian

Dalam penelitian ini, mekanisme *Good Corporate Governance* yang dikaji terfokus pada lima mekanisme inti yang mencerminkan kualitas tata kelola perusahaan secara komprehensif:

- a. **Internal Monitoring (Pengawasan Internal)**
 - Dewan Komisaris: Pengawasan strategis di tingkat tertinggi
 - Komite Audit: Pengawasan teknis terhadap pelaporan keuangan
- b. **Ownership-Based Monitoring (Pengawasan Berbasis Kepemilikan)**
 - Kepemilikan Institusional: Monitoring oleh investor institusional yang memiliki sumber daya dan keahlian memadai

- Kepemilikan Manajerial: *Alignment of interest* antara manajemen dan pemegang saham melalui kepemilikan saham oleh pihak manajemen
- c. External Monitoring (Pengawasan Eksternal)
- Kualitas Auditor: Verifikasi independen oleh pihak ketiga

Kelima mekanisme ini dipilih karena memiliki peran langsung dan krusial pengawasan pelaporan keuangan, saling melengkapi dalam membentuk sistem monitoring yang komprehensif, dan data terkait mekanisme ini tersedia secara lengkap dan konsisten pada perusahaan publik di Indonesia.

2.2 Tinjauan Variabel Penelitian

2.2.1 Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)

2.2.1.1 Defenisi Kecurangan Laporan Keuangan

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2024), kecurangan laporan keuangan adalah kesalahan penyajian atau penghilangan secara sengaja dari jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Yolanda & Gultom (2025) mendefinisikan kecurangan laporan keuangan sebagai tindakan yang disengaja dilakukan oleh perusahaan untuk menipu para pengguna laporan dengan memanipulasi isi laporan tersebut demi memperoleh keuntungan.

Statement on Auditing Standards (SAS) No. 99 mengklasifikasikan kecurangan laporan keuangan ke dalam dua kategori utama:

1. *Misstatement arising from fraudulent financial reporting*: Kesalahan penyajian yang disengaja termasuk penghilangan jumlah atau

pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan.

2. *Misstatement arising from misappropriation of assets*: Pencurian aset perusahaan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2.2.1.2 Bentuk-bentuk Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan.
2. Kesalahan penyajian atau penghilangan yang disengaja atas peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan dari laporan keuangan.
3. Kesalahan penerapan prinsip akuntansi yang disengaja berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.
4. *Overstating Revenue*: pengakuan pendapatan premature atau pencatatan transaksi fiktif.
5. *Understating expenses*: Penundaan pengakuan beban atau kapitalisasi beban yang seharusnya diakui pada periode berjalan.
6. *Overvaluing assets*: Penilaian aset yang terlalu tinggi, misalnya dengan memanipulasi penilaian persediaan atau aset tetap.
7. *Undervaluing liabilities*: Penyajian kewajiban yang lebih rendah dari nilai sebenarnya atau penghilangan kewajiban tertentu.

2.2.1.3 Beneish M-Score sebagai Alat Deteksi Fraud

Beneish M-Score adalah model matematis yang dikembangkan oleh Messod D. Beneish pada tahun 1999 untuk mendeteksi kemungkinan manipulasi earnings pada laporan keuangan. Model ini menggunakan delapan rasio keuangan yang dihitung dari data laporan keuangan untuk mengidentifikasi perusahaan yang berpotensi melakukan manipulasi.

Formula Beneish M-Score:

$$\begin{aligned} M - Score = & -4.84 + 0.920(DSRI) + 0.528(GMI) + 0.404(AQI) \\ & + 0.892(SGI) + 0.115(DEPI) - 0.172(SGAI) \\ & + 4.679(TATA) - 0.327(LVGI) \end{aligned}$$

Keterangan 8 Rasio:

1. DSRI (Days Sales in Receivables Index)

$$DSRI = \frac{Piutang\ Usaha_t \div Penjualan_t}{Piutang\ Usaha_{t-1} \div Penjualan_{t-1}}$$

Mengukur apakah piutang dan pendapatan seimbang dalam 2 tahun berturut-turut. DSRI yang tinggi menunjukkan inflasi pendapatan.

2. GMI (Gross Margin Index)

$$GMI = \frac{Laba\ Kotor_{t-1} \div Penjualan_{t-1}}{Laba\ Kotor_t \div Penjualan_t}$$

Mengukur penurunan gross margin. $GMI > 1$ menunjukkan sinyal negative untuk prospek perusahaan.

3. AQI (Asset Quality Index)

$$AQI = \frac{(1 - ((Asset\ Lancar_t + Asset\ Tetap_t) \div Total\ Asset_t))}{(1 - ((Asset\ Lancar_{t-1} + Asset\ Tetap_{t-1}) \div Total\ Asset_{t-1}))}$$

Mengukur proporsi asset non-current asset tetap. $AQI > 1$ menunjukkan kemungkinan kapitalisasi biaya yang berlebihan.

4. SGI (Sales Growth Index)

$$SGI = \frac{Sales_t}{Sales_{t-1}}$$

Pertumbuhan penjualan yang tinggi tidak selalu negative, tetapi perusahaan dengan pertumbuhan tinggi lebih mungkin melakukan manipulasi.

5. DEPI (Depreciation Index)

$$DEPI = \frac{(Depresiasi_{t-1} \div (Depresiasi_{t-1} + Asset Tetap_{t-1}))}{(Depresiasi_t \div (Depresiasi_t + Asset Tetap_t))}$$

$DEPI > 1$ menunjukkan penurunan tingkat depresiasi, yang mungkin mengindikasikan manipulasi.

6. SGAI (Sales, General and Administrative Expenses Index)

$$SGAI = \frac{(SGA Expenses_t \div Penjualan_t)}{(SGA Expenses_{t-1} \div Penjualan_{t-1})}$$

Peningkatan beban SGA relatif terhadap penjualan dapat mengindikasikan prospek negatif.

7. TATA (Total Accruals to Total Assets)

$$TATA = \frac{Laba Bersih - Arus Kas Operasi}{Total Aset}$$

Total akrual yang tinggi menunjukkan kemungkinan manipulasi laba melalui penggunaan akrual diskresioner.

8. LVGI (Leverage Index)

$$LVGI = \frac{(Total\ Kewajiban \div Total\ Aset_{(t)})}{(Total\ Kewajiban \div Total\ Aset_{(t-1)})}$$

LVGI > 1 menunjukkan peningkatan leverage yang dapat memotivasi manipulasi untuk memenuhi debt covenant.

Interpretasi M-Score:

1. **M-Score > -2,22** : Perusahaan terindikasi sebagai **MANIPULATOR** (ada kemungkinan kecurangan laporan keuangan).
2. **M-Score ≤ -2,22** : Perusahaan terindikasi sebagai **NON-MANIPULATOR** (tidak ada indikasi kecurangan).

Model Beneish M-Score dipilih dalam penelitian ini karena beberapa alasan:

1. Telah terbukti efektif dalam berbagai konteks penelitian internasional dan nasional.
2. Bersifat objektif karena berbasis pada data laporan keuangan yang terpublikasi.
3. Mudah diaplikasikan dan dapat direplikasi
4. Lebih robust dibandingkan pengukuran fraud berbasis persepsi atau hanya mengandalkan kasus hukum yang terungkap.

2.2.2 Dewan Komisaris

2.2.2.1 Definisi dan Fungsi Dewan Komisaris

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris merupakan inti dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Fungsi utama dari Dewan Komisaris

adalah mengawasi jalannya perusahaan dengan mewajibkan terlaksananya prinsip akuntabilitas. Peran Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan sangat krusial. Dewan Komisaris diharapkan dapat menjembatani kepentingan prinsipal sehingga dapat terwujud kinerja keuangan yang baik. Sebab Dewan Komisaris bertugas untuk bertindak demi kepentingan terbaik bagi perusahaan dengan menghindari kepentingan pribadi (Febrina & Sri, 2022).

Fungsi utama Dewan Komisaris antara lain:

1. Mengawasi kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan.
2. Memberikan nasihat kepada direksi.
3. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi atas pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

2.2.2.2 Karakteristik Dewan Komisaris

a. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut pedoman umum Tata Kelola Perusahaan di Indonesia, jumlah anggota dewan komisaris harus sesuai dengan kompleksitas perusahaan dan fokus pada efektivitas pengambilan keputusan perusahaan. Di perusahaan, jumlah dewan komisaris paling kurang terdiri dari dua orang. Jumlah dewan komisaris yang besar bisa menguntungkan perusahaan, misalnya dalam pertemuan antar dewan komisaris mungkin ada perbedaan pendapat antara dua pihak tersebut. Jika jumlah anggota dewan komisaris mengalami tekanan psikologis.

Sebab, jumlah anggota dewan komisaris harus lebih dari atau sama dengan jumlah anggota dewan direksi (Dika Permana & Serly, 2021).

b. Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Keberadaan komisaris independen sangat penting untuk memastikan objektivitas dalam pengawasan dan memberikan perspektif yang tidak bias dalam pengambilan keputusan strategis (Bernhard & Veny, 2024)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 33/PJOK.04/2014, komposisi komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Proporsi komisaris independen yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan.

2.2.2.3 Dewan Komisaris dan Kecurangan Laporan Keuangan

Dewan komisaris yang efektif dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan melalui beberapa mekanisme:

1. Pengawasan Strategis: Dewan komisaris mengawasi kebijakan dan keputusan strategis manajemen untuk memastikan bahwa tindakan manajemen sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya.

2. **Monitoring Management Behavior:** Dewan komisaris memantau perilaku manajemen dan memberikan checks and balances terhadap kewenangan direksi.
3. **Protecting Stakeholder Interests:** Dewan Komisaris melindungi kepentingan stakeholder dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Penelitian oleh Sahda et al., (2025) menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan komisaris berpengaruh negative terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris yang lebih besar dan lebih independent lebih efektif dalam mencegah manipulasi laporan keuangan.

2.2.3 Komite Audit

2.2.3.1 Definisi dan Fungsi Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (PJOK Nomor 55/PJOK.04/2015).

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Memberikan pendapat independent dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.

4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.

2.2.3.2 Karakteristik Komite Audit

a. Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit mengacu pada jumlah anggota yang tergabung dalam komite audit. Berdasarkan PJOK Nomor 55/PJOK.04/2015, komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota. Ukuran komite audit yang lebih besar dapat meningkatkan efektifitas pengawasan karena memiliki lebih banyak sumber daya dan keahlian untuk melakukan penelaahan yang mendalam terhadap laporan keuangan.

b. Frekuensi Rapat Komite Audit

Frekuensi rapat komite audit mencerminkan intensitas aktivitas pengawasan yang dilakukan. PJOK Nomor 55/PJOK.04/2015 mengatur bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Frekuensi rapat yang lebih tinggi menunjukkan komite audit yang lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal.

c. Kompetensi Komite Audit

Kompetensi komite audit diukur dari latar belakang Pendidikan dan pengalaman anggota komite audit di bidang akuntansi dan keuangan. PJOK mensyaratkan bahwa paling sedikit 1 orang anggota komite audit memiliki latar belakang Pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Kompetensi yang memadai memungkinkan komite audit untuk melakukan penelaahan yang efektif terhadap laporan keuangan dan mengidentifikasi potensi manipulasi.

2.2.3.3 Komite Audit dan Kecurangan Laporan Keuangan

Komite audit berperan penting dalam mencegah kecurangan laporan keuangan melalui:

1. **Financial Reporting Oversight:** Komite Audit melakukan penelaahan mendalam terhadap laporan keuangan untuk memastikan kewajaran penyajian dan kepatuhan terhadap standar akuntansi.
2. **Internal Control Monitoring:** Komite Audit mengawasi efektifitas sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa pengendalian yang ada dapat mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan.
3. **Audit Process Supervision:** Komite audit mengawasi proses audit internal dan eksternal untuk memastikan independensi dan efektivitas audit.
4. **Communication Bridge:** Komite Audit menjadi jembatan komunikasi antara auditor eksternal, auditor internal, manajemen, dan dewan komisaris.

Penelitian Fitriyanti & Achyani, (2024) menunjukkan bahwa karakteristik komite audit (ukuran, frekuensi rapat, dan kompetensi) berpengaruh negatif

terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Hal ini mengindikasikan bahwa komite audit yang efektif dapat mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi laporan keuangan.

2.2.4 Kualitas Auditor

2.2.4.1 Definisi dan Fungsi Kualitas Auditor

Auditor eksternal adalah pihak independent yang memberikan jasa audit atas laporan keuangan perusahaan. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), auditor independent bertanggung jawab untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan sesuai dengan standar auditing.

Peran utama auditor eksternal meliputi:

1. Memberikan assurance bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Mendeteksi kesalahan material dan kecurangan dalam laporan keuangan.
3. Mengevaluasi efektifitas sistem pengendalian internal perusahaan.
4. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem dan prosedur perusahaan.

2.2.4.2 Karakteristik Kualitas Auditor

Kualitas auditor mengacu pada kemampuan auditor untuk mendeteksi dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien.

Beberapa indicator kualitas auditor antara lain:

a. Ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik)

Ukuran KAP sering dijadikan proksi untuk kualitas auditor. KAP besar, khususnya Big Four, dianggap memiliki audit yang lebih tinggi karena:

- Memiliki sumber daya yang lebih banyak (SDM, Teknologi, metodologi)
- Memiliki reputasi yang harus dijaga
- Memiliki independensi yang lebih tinggi karena tidak tergantung pada satu klien
- Memiliki sistem quality control yang lebih ketat
- Memiliki pengalaman dan keahlian yang lebih luas

KAP Big Four di Indonesia:

1. Deloit (KAP Osman Bing Satrio dan Rekan)
2. PwC (KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan)
3. EY (KAP Purwantono, Sungkoro & Surja)
4. KPMG (KAP Siddharta Widjaja & Rekan)

b. Reputasi Auditor

Reputasi auditor mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kualitas jasa audit yang diberikan. Auditor dengan reputasi baik akan lebih berhati-hati dalam melakukan audit karena memiliki lebih banyak yang dipertaruhkan jika terjadi audit failure.

c. Independensi Auditor

Independensi adalah sikap mental auditor yang tidak mudah dipengaruhi dalam melaksanakan tugasnya. Auditor yang independent akan lebih objektif dalam memberikan opini dan tidak membiarkan tekanan dari klien mempengaruhi judgment profesionalnya.

2.2.4.3 Kualitas Auditor dan Kecurangan Laporan Keuangan

Kualitas auditor yang tinggi dapat mengurangi kecurangan laporan keuangan melalui beberapa mekanisme:

1. **Detection Function:** Auditor berkualitas tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi salah saji material dan manipulasi laporan keuangan melalui prosedur audit yang lebih komprehensif dan skeptisisme profesional yang lebih tinggi.
2. **Deterrence Effect:** Keberadaan auditor berkualitas tinggi memberikan efek jera (deterrence) terhadap manajemen yang berniat melakukan kecurangan, karena risiko terdeteksinya manipulasi menjadi lebih besar.
3. **Reporting Responsibility:** Auditor berkualitas tinggi lebih cenderung melaporkan temuan manipulasi kepada pihak yang berwenang karena memiliki independensi yang lebih tinggi dan reputasi yang harus dijaga.
4. **Quality Assurance:** Auditor Big Four memiliki sistem quality control yang lebih ketat, sehingga risiko audit failure menjadi lebih rendah.

Penelitian Amri (2021) membuktikan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four memiliki tingkat kecurangan laporan keuangan yang lebih rendah

dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non-Big Four. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas auditor berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

2.2.5 Kepemilikan Institusional

2.2.5.1 Definisi dan Fungsi Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merujuk pada proporsi saham perusahaan yang dikuasai oleh lembaga seperti perusahaan investasi, bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan institusi keuangan lainnya. Dalam tata kelola perusahaan, pemegang saham institusional memiliki posisi strategis karena mereka umumnya memiliki kompetensi, sumber daya, dan pengalaman dalam menilai kinerja manajemen. Fungsi utama kepemilikan institusional adalah meningkatkan efektivitas mekanisme pengawasan melalui monitoring yang ketat terhadap manajer, meminimalkan praktik oportunistik, serta memastikan bahwa keputusan manajemen tetap selaras dengan kepentingan pemegang saham. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi biasanya dianggap mampu menekan perilaku yang mengarah pada misrepresentasi laporan keuangan.

2.2.5.2 Karakteristik Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari kepemilikan individu, yaitu:

1. Institusi umumnya memiliki kemampuan analisis yang lebih kuat dan akses terhadap informasi yang lebih kuat dan akses terhadap informasi yang lebih luas, sehingga mereka dapat menilai kebijakan manajerial secara lebih kritis.

2. Institusi cenderung bersikap rasional dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang, sehingga perilaku mereka tidak mudah dipengaruhi oleh fluktuasi pasar jangka pendek.
3. Institusi memiliki kekuatan tawar yang lebih besar dalam mempengaruhi keputusan perusahaan, baik melalui voting dalam rapat umum pemegang saham maupun melalui tekanan langsung kepada manajemen.

Karakteristik-karakteristik ini menjadikan kepemilikan institusional sebagai unsur penting dalam pengawasan perusahaan.

2.2.5.3 Kepemilikan Institusional dan Kecurangan Laporan Keuangan

Kepemilikan institusional sering dikaitkan dengan penurunan risiko terjadinya kecurangan laporan keuangan. Institusi yang memiliki kepemilikan signifikan biasanya lebih aktif dalam mengawasi kinerja manajer, sehingga peluang manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan menjadi lebih kecil. Tingkat monitoring yang tinggi mampu menekan praktik earnings management, misstatement, ataupun tindakan pengaburan informasi. Selain itu, institusi cenderung menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih ketat, sehingga mereka berperan sebagai mekanisme kontrol eksternal yang efektif dalam mencegah kecurangan. Dengan demikian, semakin besar Kepemilikan institusional dalam perusahaan, semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan praktik kecurangan laporan keuangan.

2.2.6 Kepemilikan Manajerial

2.2.6.1 Definisi dan Fungsi Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kondisi ketika sebagian saham perusahaan dimiliki oleh pihak manajemen, seperti direktur, komisaris, atau eksekutif lainnya. Dalam perspektif teori keagenan, kepemilikan manajerial berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Ketika manajer turut memiliki saham, mereka tidak hanya bertindak sebagai pengelola tetapi juga sebagai pemilik yang merasakan langsung dampak dari setiap keputusan yang diambil. Hal ini mendorong manajer untuk bekerja secara lebih efisien, mengurangi perilaku oportunistik, dan berusaha meningkatkan nilai perusahaan.

2.2.6.2 Karakteristik Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial memiliki ciri utama berupa adanya *duality role*, yaitu manajer bertindak sebagai pengambil keputusan sekaligus sebagai pemegang saham. Karakteristik ini menciptakan insentif kuat bagi manajer untuk berfokus pada kinerja jangka panjang dan meminimalkan tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Namun, dalam tingkat kepemilikan tertentu, kepemilikan manajerial juga dapat menimbulkan risiko *entrenchment*, yaitu kondisi ketika manajer merasa terlalu kuat sehingga mengurangi tingkat akuntabilitas mereka. Oleh karena itu, efek kepemilikan manajerial sering kali dipengaruhi oleh proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen.

2.2.6.3 Kepemilikan Manajerial dan Kecurangan Laporan Keuangan

Kepemilikan manajerial biasanya diasosiasikan dengan rendahnya kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Ketika manajer memiliki

saham, mereka memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas dan reputasi perusahaan, sehingga kecenderungan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan menjadi lebih rendah. Kepemilikan tersebut mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan keselarasan tujuan antara manajemen dan pemegang saham. Namun, apabila kepemilikan manajerial terlalu tinggi, potensi kecurangan justru dapat meningkat karena manajer memiliki kontrol yang besar dan dapat melakukan tindakan manipulatif tanpa pengawasan efektif. Dengan demikian, proporsi kepemilikan manajerial memainkan peran penting dalam menentukan hubungan antara manajemen dan risiko kecurangan laporan keuangan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah rangkuman penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fika Fatiyah Amri, Daniati Putri (2024)	Corporate Governance Dan Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada PT Di Sektor Real Estate Dan Kontruksi)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan untuk variabel dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.	Sahda, F. T., Nindito, M., & Khairunnisa, H. (2025)	Pengaruh Penerapan Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator kecurangan laporan keuangan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kepemilikan manajerial dan institusional. Sementara itu, indikator kecurangan laporan keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan oleh keberagaman gender dan proporsi dewan komisaris.
3.	Lukman Ibrahim, Hidayat Darwis, Supriatiningsih (2022)	Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Menekan Tindakan Kecurangan Pada Perusahaan Go Green Di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara financial stability dan Rationalization (TATA) terhadap kecurangan laporan keuangan. Tidak terdapat pengaruh antara Nature of Industry (REV), komite audit mampu memperlemah pengaruh financial stability terhadap kecurangan laporan keuangan., komite audit tidak mampu memoderasi pengaruh nature in industry terhadap kecurangan laporan keuangan. Komite audit mampu memperkuat pengaruh rationalization terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk menghindari kecurangan laporan keuangan perusahaan harus memberikan reward kepada karyawan berprestasi dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap semua kegiatan perusahaan

4.	Wulan Fuji Fitriani (2024)	Tata Kelola Perusahaan Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Komite audit tidak ada pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Profitabilitas tidak dapat memoderasi hubungan dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap kecurangan laporan keuangan.</p>
5.	Dewi Rahayu (2023)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> dan Periode Terjadi Covid19 Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Perbankan Indonesia	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dan tahun terjadinya covid19 berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, rapat dewan komite audit serta ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perbankan yang telah diatur dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan harus diterapkan di atas standar minimal yang harus dipatuhi oleh peraturan agar perbankan yang memiliki kompleksitas transaksi dan operasi dapat meminimalkan terjadinya kecurangan laporan keuangan.</p>

6.	David Kurniawan dan Reskino (2023)	Peran <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan: Prespektif Fraud Pentagon pada Kementerian dan Lembaga Pemerintah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasionalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap indikasi kecurangan dalam laporan keuangan. Disisi lain, faktor-faktor tekanan, kesempatan, kompetensi, dan kesombongan tidak memiliki dampak yang signifikan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik terbukti dapat memoderasi dampak rasionalisasi terhadap kemungkinan kecurangan dalam laporan keuangan.
7.	Enggar Diah Puspa Arum, Rico Wijaya, Ilham Wahyudi dan Aulia Beatrice Brilliant (2023)	Corporate Governance and Financial Statement Fraud during the COVID-19: Study of Companies under Special Monitoring in Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika menggunakan Z-Score, hanya ukuran dewan direksi yang memiliki efek negatif terhadap kecurangan laporan keuangan selama pandemi COVID-19. Sementara itu, dengan F-Score, variabel tata kelola korporasi yang diteliti tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan selama pandemi COVID-19.
8.	Arief Mulyadianto, dwi Jaya Kirana, Aniek Wjiayanti (2020)	Kontribusi Corporate Governance Dalam Mengurangi Kecurangan Laporan Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa performa dewan komisaris dan kepemilikan institusional berpengaruh untuk mengurangi kecurangan laporan keuangan sedangkan keahlian keuangan komite audit tidak berpengaruh dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan.
9.	Enggar Diah Puspa Arum dan Widya Sari Wendry (2025)	Board Characteristics and Fianancial Statement Fraud: Evidence from Indonesian Public Comapanies	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik dewan direksi memainkan peran penting dalam melakukan pengawasan yang efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan.

10.	Feby Priswita dan Salma Taqwa (2019)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua mekanisme tata kelola perusahaan seperti kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.
-----	--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada *agency theory* dan *fraud theory*. *Agency theory* menjelaskan bahwa terdapat potensi konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen) yang dapat mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan. Untuk mengurangi konflik tersebut, diperlukan mekanisme monitoring yang efektif melalui *corporate governance*.

Fraud theory menjelaskan bahwa kecurangan terjadi ketika terdapat tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisme (*rationalization*). Mekanisme *corporate governance* yang kuat dapat mengurangi kesempatan terjadinya kecurangan dengan meningkatkan pengawasan dan memperkuat sistem pengendalian internal.

Dalam penelitian ini, lima mekanisme *Good Corporate Governance* dikaji sebagai sistem pengawasan berlapis (*multi-layered monitoring*):

Layer 1 – Internal Strategic Monitoring: Dewan Komisaris berperan sebagai pengawasan strategis di tingkat tertinggi yang mengawasi kebijakan dan keputusan manajemen. Ukuran dewan komisaris yang optimal dan proporsi

komisaris independen yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengurangi kemungkinan manipulasi laporan keuangan.

Layer 2 – Internal Technical Monitoring: Komite Audit berperan dalam pengawasan teknis terhadap proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Komite audit yang efektif (ukuran memadai, rapat rutin, dan memiliki kompetensi di bidang akuntansi/keuangan) dapat mendeteksi potensi manipulasi sejak dini dan memastikan kualitas laporan keuangan.

Layer 3 – Ownership-Based Monitoring: Struktur kepemilikan memberikan mekanisme pengawasan berdasarkan insentif ekonomis pemilik perusahaan. Kepemilikan institusional, yang dimiliki oleh investor institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun, memiliki sumber daya, keahlian, dan motivasi yang kuat untuk melakukan monitoring intensif terhadap manajemen. Investor institusi cenderung lebih aktif dalam pengawasan karena besarnya investasi yang mereka tanamkan. Di industri makanan dan minuman yang memerlukan investasi modal besar dan memiliki risiko operasional tinggi, peran investor institusi menjadi sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas manajemen.

Disisi lain, kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga mengurangi motivasi manajemen untuk melakukan kecurangan. Ketika manajemen memiliki saham perusahaan, mereka akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena turut menanggung konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam konteks industri yang menghadapi tekanan finansial tinggi, kepemilikan manajerial dapat

berfungsi sebagai mekanisme insentif untuk mendorong keputusan strategis jangka panjang daripada manipulasi jangka pendek untuk mencapai target.

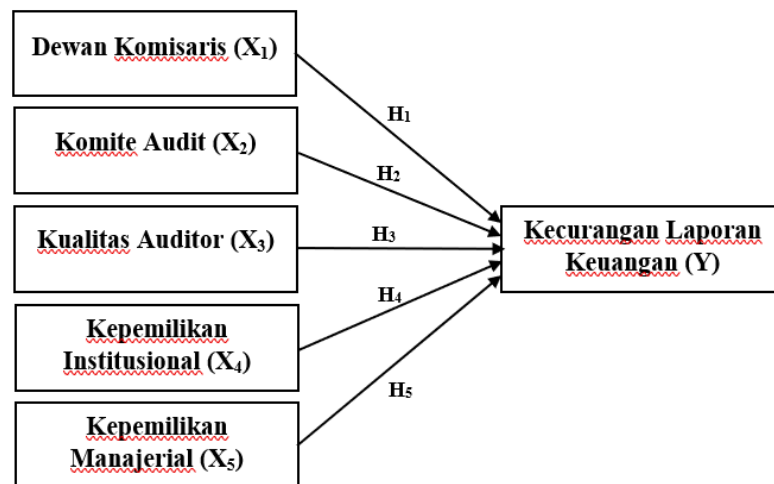
Layer 4 – External Verification: Kualitas Auditor Eksternal memberikan verifikasi independen dari pihak ketiga. Auditor berkualitas tinggi (KAP Big Four) memiliki kemampuan deteksi yang lebih baik, metodologi audit yang lebih canggih, dan memberikan efek deterrence yang lebih kuat terhadap manajemen yang berniat melakukan kecurangan. Dalam industri makanan dan minuman, auditor eksternal berkualitas tinggi memiliki expertise khusus dalam mengaudit valuasi aset biologis, kompleksitas transaksi rantai pasokan, dan kepatuhan terhadap regulasi industri.

Kelima mekanisme ini bekerja sinergis membentuk sistem pengawasan yang komprehensif terhadap risiko kecurangan laporan keuangan di industri manufaktur makanan dan minuman. Dewan komisaris mengawasi dari perspektif strategis dengan fokus pada kebijakan perusahaan dan keputusan bisnis besar. Komite audit mengawasi dari perspektif teknis dengan memastikan integritas proses pelaporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal. Struktur kepemilikan memberikan insentif monitoring berbasis ekonomis, di mana investor institusi melakukan pengawasan aktif dan kepemilikan manajerial mendorong alignment of interest. Terakhir, auditor eksternal memberikan verifikasi independen dan objektif atas kewajaran laporan keuangan.

Kombinasi kelima mekanisme ini diharapkan dapat secara efektif mencegah dan mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang diukur menggunakan Beneish M-Score, khususnya mengingat karakteristik unik dan

risiko tinggi yang melekat pada industri manufaktur makanan dan minuman di Indonesia. Sistem pengawasan berlapis ini bertujuan untuk menutup celah opportunity yang dapat dieksploitasi manajemen, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta pada akhirnya melindungi kepentingan seluruh stakeholder perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Berdasarkan agency theory, dewan komisaris berperan sebagai mekanisme monitoring untuk mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Dewan komisaris yang efektif dapat mengawasi tindakan manajemen dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Ukuran dewan komisaris yang lebih besar memberikan lebih banyak sumber daya untuk melakukan pengawasan yang komprehensif. Selain itu, proporsi komisaris independen yang tinggi dapat meningkatkan objektivitas pengawasan karena komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen atau pemegang saham pengendali.

Dari perspektif *fraud theory*, dewan komisaris yang kuat dapat mengurangi opportunity (kesempatan) untuk melakukan kecurangan dengan meningkatkan monitoring dan oversight terhadap aktivitas manajemen. Pengawasan yang ketat membuat risiko terdeteksinya kecurangan menjadi lebih tinggi, sehingga memberikan efek deterrence bagi manajemen.

Penelitian Sahda et al. (2025) menemukan bahwa karakteristik dewan komisaris (ukuran dan independensi) berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Semakin baik kualitas dewan komisaris, semakin rendah tingkat kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.

2.4.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Komite audit merupakan perpanjangan tangan dewan komisaris yang secara khusus bertugas mengawasi proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan proses audit. Berdasarkan *agency theory*, komite audit

berfungsi sebagai mekanisme monitoring yang dapat mengurangi asimetris informasi antara manajemen dan pemegang saham.

Komite Audit yang efektif memiliki karakteristik:

- Ukuran yang memadai: Memberikan cukup sumber daya untuk melakukan penelaahan mendalam
- Frekuensi rapat yang tinggi: Menunjukkan aktivitas pengawasan yang intensif
- Kompetensi di bidang akuntansi/keuangan: Memungkinkan penelaahan teknis yang efektif

Dari perspektif *fraud theory*, komite audit yang efektif dapat mengurangi opportunity untuk melakukan kecurangan dengan:

1. Melakukan penelaahan kritis terhadap laporan keuangan
2. Mengawasi efektifitas sistem pengendalian internal
3. Memastikan independensi dan efektifitas audit internal dan eksternal
4. Menjadi jalur komunikasi antara auditor, manajemen, dan dewan komisaris

Penelitian (Amri & Putri, 2024) menunjukkan bahwa karakteristik komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Komite audit yang lebih besar, lebih efektif, dan lebih kompeten dapat lebih efektif mencegah manipulasi laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.

2.4.3 Pengaruh Kualitas Auditor terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Auditor eksternal berperan sebagai pihak independen yang memberikan assurance atas kewajaran laporan keuangan. Berdasarkan agency theory, auditor eksternal berfungsi sebagai mekanisme monitoring eksternal yang dapat mengurangi asimetris informasi dan memberikan kredibilitas terhadap laporan keuangan yang disajikan manajemen.

Kualitas auditor, yang diproksikan dengan ukuran KAP (Big Four vs Non-Big Four), mencerminkan kemampuan auditor untuk:

1. **Mendeteksi salah saji material:** Auditor Big Four memiliki metodologi audit yang lebih canggih, teknologi yang lebih maju, dan SDM yang lebih kompeten
2. **Melaporkan temuan:** Auditor Big Four memiliki independensi yang lebih tinggi dan reputasi yang harus dijaga, sehingga lebih cenderung melaporkan temuan manipulasi
3. **Memberikan efek deterrence:** Keberadaan auditor berkualitas tinggi membuat manajemen lebih berhati-hati karena risiko terdeteksi lebih tinggi

Dari perspektif *fraud theory*, kualitas auditor yang tinggi dapat mengurangi opportunity untuk melakukan kecurangan karena:

- Prosedur audit yang lebih komprehensif meningkatkan kemungkinan deteksi
- Skeptisisme profesional yang lebih tinggi membuat auditor lebih waspada terhadap red flags
- Sistem quality control yang ketat mengurangi risiko audit failure

Penelitian Fitriyanti & Achyani (2024) membuktikan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four memiliki tingkat kecurangan laporan keuangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non-Big Four. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas auditor berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.

2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Berdasarkan agency theory, kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme monitoring eksternal yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Investor institusional memiliki karakteristik yang berbeda dengan investor individual, yaitu kepemilikan yang lebih besar, sumber daya yang lebih memadai, dan keahlian yang lebih tinggi dalam menganalisis kinerja perusahaan.

Dari perspektif *fraud theory*, kepemilikan institusional yang tinggi dapat mengurangi opportunity untuk melakukan kecurangan karena monitoring yang lebih intensif membuat risiko terdeteksinya manipulasi menjadi lebih tinggi. Selain itu, investor institusional dapat memberikan tekanan kepada manajemen untuk menerapkan corporate governance yang baik, termasuk sistem pengendalian internal yang kuat dan pengawasan yang efektif.

Penelitian empiris menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan karena monitoring yang lebih efektif. Namun, penelitian lain menemukan bahwa efek kepemilikan institusional tergantung pada karakteristik investor institusional, seperti tipe institusi (bank, asuransi, dana pensiun) dan orientasi investasi (aktif vs pasif, jangka pendek vs jangka panjang).

Meskipun demikian, dalam konteks *Good Corporate Governance* keberadaan investor institusional yang signifikan merupakan salah satu indikator kualitas tata kelola yang baik karena mencerminkan adanya pemegang saham yang memiliki kemampuan dan insentif untuk melakukan monitoring yang efektif. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.

2.4.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme *Good Corporate Governance* yang dapat mengurangi konflik keagenan antara prinsipal dan agen. Berdasarkan *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976), kepemilikan manajerial berfungsi sebagai mekanisme bonding yang menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham.

Dari perspektif *fraud theory*, kepemilikan manajerial dapat mengurangi motivasi untuk melakukan kecurangan melalui beberapa mekanisme:

1. Reduced Pressure

Manajemen yang memiliki saham cenderung memiliki keamanan kerja yang lebih baik dan tidak terlalu tertekan untuk mencapai target jangka pendek dengan cara manipulatif. Mereka lebih fokus pada penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan.

2. Internalized Costs

Berbeda dengan manajemen yang tidak memiliki saham, manajer-pemilik akan menanggung secara langsung biaya dari terungkapnya fraud, baik dalam bentuk:

- Penurunan nilai saham yang mereka miliki
- Sanksi hukum dan denda
- Kerugian reputasi yang berdampak pada nilai portofolio mereka
- Kehilangan kesempatan bisnis di masa depan

3. Self-monitoring

Kepemilikan manajerial menciptakan mekanisme self-monitoring yang efektif. Manajemen akan lebih ketat dalam mengawasi operasional dan pelaporan keuangan karena mereka sendiri yang akan merasakan dampaknya jika terjadi masalah.

Penelitian empiris menunjukkan hasil yang beragam. Rostami & Rezaei (2022) dalam penelitian yang dipublikasikan di *Journal of Financial Crime* menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap financial statement fraud. Mereka menyatakan bahwa *fraud tends to decrease when managerial ownership increases*, karena manajer yang memiliki kepemilikan saham memiliki *job security* yang lebih baik dan tidak terlalu rentan terhadap tekanan eksternal.

Aryani et al. (2023) dalam penelitiannya pada perusahaan yang terdaftar di IDX tahun 2018-2022 juga menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap financial reporting fraud sebagai salah satu mekanisme corporate governance yang penting, meskipun hasilnya menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan secara individual. Namun, dalam konteks corporate governance yang komprehensif, keberadaan kepemilikan manajerial tetap menjadi elemen penting.

Namun, perlu diperhatikan juga perspektif entrenchment yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi dapat menciptakan efek negatif. Ketika kepemilikan manajerial sangat dominan, manajemen mungkin menjadi terlalu powerful dan dapat mengabaikan mekanisme pengawasan lainnya. Oleh karena itu, efek kepemilikan manajerial terhadap fraud mungkin tidak linear.

Dalam konteks Indonesia, kepemilikan manajerial di perusahaan publik umumnya relatif rendah dibandingkan dengan kepemilikan institusional atau keluarga. Meskipun demikian, dalam kerangka *Good Corporate Governance*, keberadaan kepemilikan manajerial yang moderat dianggap dapat menjadi mekanisme alignment yang efektif.

Penelitian terbaru yang dapat diakses seperti Rostami & Rezaei (2022) yang dipublikasikan di *Journal of Financial Crime*, dan penelitian pada konteks Indonesia oleh Aryani et al. (2023) memberikan bukti empiris mengenai peran kepemilikan manajerial dalam *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah:

H5: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.